

TAJUK RENCANA

Jika Beda, Itu Biasa

BULAN suci Ramadan segera tiba. Umat Islampun biasa menyambut tamu agung ini dengan suka cita. Kewajiban berpuasa juga dijalankan dengan gembira, di samping memperbanyak berbagai amal ibadah lainnya. Hanya saja, kapan harus memulai berpuasa, juga mengakhirinya, biasa berbeda.

Jauh-jauh hari, PP Muhammadiyah sudah mengumumkan, berdasarkan hisab 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022. Sedang pemerintah, dalam memutuskan awal Ramadan, atau juga akhir Ramadan/1 Syawal, melalui sidang istbat. Selain menggunakan dasar hisab atau perhitungan astronomi, dalam memutuskannya mendasarkan hasil *rukyatul hilal* atau pengamatan secara langsung keberadaan bulan sabit saat matahari tenggelam, yang menandakan sudah tanggal 1 bulan qomariyah, tahun hijriyah. Untuk itu Kementerian Agama menururkan banyak petugas di setiap provinsi guna melakukan *rukyatul hilal* dengan semua piranti yang dibutuhkan, termasuk kitab suci Alquran untuk menyumpah jika ada yang bisa melihat hilal. Untuk *rukyatul hilal* nanti sore dilakukan di 101 lokasi.

Sidang istbat atau penetapan akan dilaksanakan Jumat (1/4) petang nanti di Kantor Kemenag RI, yang bertepatan tanggal 29 Sya'ban. Sidang mengundang tokoh atau perwakilan semua ormas Islam serta berbagai pihak terkait. Jika dalam sidang tersebut dilaporkan ada anggota tim *rukyatul hilal* berhasil melihat bulan sabit, maka akan ditetapkan malam itu sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Tetapi jika dari semua tim tidak ada yang berhasil melihat bulan, maka usia bulan Sya'ban dikenakan menjadi 30 hari atau *istikmal*, sehingga 1 Ramadan 1443 H jatuh pada hari Minggu 3 April 2022

Kita belum tahu bagaimana keputusan Sidang Istbat nanti sore. Jika pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada 2 April 2022, maka Sabtu besok mayoritas umat Islam memulai ibadah puasa pada

hari yang sama. Tetapi kalau keputusannya 1 Ramadan jatuh 3 April, maka dalam memulai berpuasa Ramadan tidak Bersama-sama. Tetapi seandainya keputusannya tidak sama dengan keputusan PP Muhammadiyah, sebenarnya berbeda dalam mengawali Ramadan maupun mengakhiri Ramadan, merupakan hal yang biasa. Peristiwa semacam ini sudah terjadi berulang kali dan di masa-masa mendatang pun akan bisa terulang lagi. Bahkan seandainya Muhammadiyah dan pemerintah sama, selalu saja ada kelompok-kelompok kecil umat Islam yang berbeda, misalnya kelompok Islam Aboge yang mempunyai cara sendiri dalam menentukan kalender.

Pendek kata, perbedaan awal atau akhir puasa merupakan hal biasa dan tidak menjadi masalah dalam masyarakat kita. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Hal semacam ini sudah biasa terjadi, bahkan dalam satu keluarga saja bisa ada yang berbeda. Karena itu sudah biasa menghadapi perbedaan, maka semua akan berjalan secara baik dan ukhuwah pasti akan terjaga sebagaimana halnya selama ini.

Dalam kaitan ini memang bukan masalah kekompakan atau kebersamaan dalam hubungan sosial, melainkan keyakinan dalam menjalankan ibadah, yaitu memulai berpuasa. Karena mayoritas umat Islam memang awam dalam hal ilmu falak atau astronomi, maka yang dilakukan hanya mengikuti saja yang diyakini benar. Mau mulai berpuasa Sabtu atau mengikuti hasil penetapan pemerintah, boleh-boleh saja sesuai keyakinannya. Sedang yang bertanggungjawab adalah yang memutuskannya.

Yang pasti, mari menata diri dan mensucikan hati untuk memasuki bulan suci nanti. Harapannya, segenap umat Islam menjalankan ibadah puasa dan berbagai amal ibadah dan kebaikan lainnya. Selanjutnya, berbagai kebaikan ini selain berimplikasi pada diri sendiri juga kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ameen... □

Masduki

PERINGATAN Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 1 April 2022 tahun ini ditandai dengan beragam tantangan dan persoalan klasik dalam sistem penyiaran Indonesia. Sejak kemunculan UU Cipta Kerja No. 11/2020, sistem penyiaran di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan, dari desentralisasi menuju re-sentralisasi. UU ini menghapus keharusan sistem siaran lokal dan jaringan, sehingga kepemilikan radio dan televisi lokal sebagai upaya pemerataan ekonomi media kian terhambat. Ironisnya, perhatian terhadap krisis ini sangat minimal, baik dari pemerintah maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Problem Struktural

Pasca pengesahan UU No. 32/2002, komitmen formal untuk pemerataan kesempatan mengelola dan menikmati keuntungan bisnis dari penyiaran di Indonesia sempat menguat. Ketentuan mengenai sistem penyiaran lokal dan jaringan, menggantikan sistem penyiaran nasional (baca Jakarta) menjadi indikator utamanya. Sentralisasi penyiaran di Jakarta, dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada segelintir konglomerat secara formal dihapus. Namun implementasinya hingga tahun 2022 ini gagal. Para konglomerat media di Jakarta melakukan perlawanan dan mereka terlalu kuat dibendung pemerintah.

Dalam sejarah penyiaran Indonesia sejak Orde Baru, kebijakan sentralisasi penyiaran di Jakarta, misalnya melalui RRI dan TVRI telah menjadi pilihan dalam upaya menjadikan media siaran sebagai alat propaganda yang efektif, mudah dikontrol. Pola pikir serupa juga diberlakukan untuk sistem penyiaran komersial. Pemerintahan Soeharto memberi izin operasi televisi komersial dengan layanan siaran nasional, misalnya untuk RCTI, ANTV dan Indosiar, bukan siaran lokal dan berjaringan. Kebijakan sentralisasi ini membuat radio dan televisi lokal yang tumbuh sejak awal 1970-an mengalami mati suri.

Problem struktural lemahnya komite-



KR-JOKO SANTOSO

televisi dengan siaran nasional dari Jakarta jadi pemain utama penyiaran. Radio dan televisi lokal hanya 'penggembira'. Keberadaan UU Cipta Kerja yang menghapus sistem siaran berjaringan, menyempurnakan kondisi terpuruk yang dialami radio dan televisi lokal di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Kolaborasi Digital

Menghadapi kondisi struktural yang suram di atas, maka pilihan yang dapat ditempuh para pengelola radio dan televisi lokal adalah melakukan kolaborasi. Kompetisi di antara radio dan televisi lokal menjadi tidak relevan, bahkan akan saling mematikan. Platform digital yang makin menggurita, baik website, media sosial maupun aplikasi bergerak pintar

dapat menjadi peluang menguatkan bisnis bersama, menghadapi serbuan bisnis konten lembaga penyiaran berskala jaringan nasional dan global. Transformasi menjadi media layanan berbasis digital merupakan keharusan, namun sinergi menjadi kata kuncinya.

Belajar dari pandemi COVID-19 dan krisis yang dihadapi media cetak pasca migrasi pembaca ke platform digital, maka pengelola bisnis radio dan televisi yang murni dari pemilik lokal harus menempuh langkah kreatif. Sebagai pelaku media lokal yang lebih memahami apa kebutuhan konsumen lokal, maka penyiaran lokal akan terus tumbuh jika mampu menjalin kemitraan strategis dengan aktor lokal. Bercermin pada model bisnis penyiaran di Amerika Serikat, sebagai kiblat kapitalisme media, dua sisi: penyiaran nasional dan lokal sebetulnya bisa tumbuh sinergis, karena memang ekosistemnya berbeda. Kekuatan penyiaran lokal pada lokalitasnya, sedang penyiaran Jakarta harus berkompetisi dengan media siaran berskala internasional seperti CNN, ABC, dll. Asosiasi seperti PRSSNI, ATVLI harus aktif mendorong pemerintah dan Komisi Penyiaran untuk mewujudkan prinsip keseimbangan bisnis siaran nasional dan lokal. Peringatan Harsiarnas bukan sekadar menggelorakan peran penyiaran sebagai pilar kebudayaan atau persatuan bangsa. Isu yang lebih terukur, berpihak kepada publik lokal justru lebih penting disuarakan dan diwujudkan. □

**) Masduki. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII. Ketua PR2Media.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

Masjid dan Potensi Wisata Religi

SELAIN memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga mempunyai destinasi yang berpotensi pada wisata halal. Menurut Menparekraf 'Sandiaga Uno', Indonesia masuk ke dalam lima negara dengan pengeluaran wisata halal tahun 2019 berdasarkan data dari State of Global Islamic Economic Report 2020/2021, sebesar \$11,2 miliar US atau sekitar Rp 160,720 triliun (Kememparekraf, 2021).

Data Kementerian Agama ada 280.320 masjid di Indonesia sampai bulan Maret 2022. Ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk pemberdayaan ekonomi. Untuk wilayah DIY tahun 2021 ada 8.107 masjid, dan 6.792 mushola/langgar.

Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dan tujuan untuk mengetahui sesuatu; dapat juga yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, keagamaan, dan keperluan lainnya. Wisata religi merupakan sebuah perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pelajaran (edukasi).

Sedang wisata halal adalah serangkaian layanan fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk memberi dan memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim (Sutono, 2019). Motif wisata religi bisa sekadar untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, bersantai hingga studi dan kegiatan agama. Potensi wisata sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya wisata (Pendit, 1999).

Potensi wisata religi antara lain (1). Potensi budaya, yaitu potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik adat istiadat, kesenian, dan budaya. (2). Potensi alamiah, potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik dan geografi seperti alam. (3). Potensi manusia atau

Arif Sulfiantono

wisata buatan, manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, seperti melalui pemertanian tarian/kesenian daerah hingga produk manusia (buatan).

Menurut informasi Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, ÂdUstad HM. Jazir ASP,Âd, wisatawan yang berkunjung ke Masjid Jogokariyan, setiap bulan mencapai 50 hingga 60 bus besar. Mayoritas pengurus atau jemaah masjid, organisasi keagamaan atau sekolah yang ingin belajar manajemen kemasjid. Aktivitas masjid Jogokariyan termasuk dari potensi wisata buatan.

Pariwisata termasuk bisnis atau industri kreatif yang mempunyai keluaran/ *output* ekonomi atau uang. Masjid Jogokariyan sudah melakukannya dengan menyelenggarakan berbagai atraksi even atau kegiatan yang menarik wisatawan. Salah satunya Pasar Rakyat yang digelar tiap hari Sabtu dan Ahad dari Subuh hingga siang.

Pasar Rakyat Jogokariyan yang dimulai 8 Agustus 2021 bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian warga yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid. Menurut Ustad Jazir, omzet bulanan Pasar Rakyat sekarang mencapai Rp 1 milyar dan mampu memperbaiki ekonomi warga, bahkan menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung wisata religi Masjid Jogokariyan.

Potensi wisata religi lainnya yang jarang dilirik adalah eco-masjid, yakni menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran cinta lingkungan. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh Masjid Al Muharram, Kampung Brajan, Kasihan Bantul sejak tahun

2013 dengan nama Gerakan Sedekah Sampah. Melalui gerakan berwawasan lingkungan ini hasilnya dapat dimanfaatkan untuk santunan pendidikan, kesehatan dan sembako untuk warga.

Bahkan gerakan sedekah sampah Masjid Al Muharram inilah yang menginspirasi lahirnya program eco-masjid yang dicanangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada November 2017. Masjid Al Muharram-pun menjadi salah satu destinasi wisata religi edukasi lingkungan.

Masjid yang memiliki tanah wakaf pertanian atau perkebunan pun dapat menjadi destinasi wisata religi berbasis alam dan edukasi. Memasuki ekonomi kreatif kini wisata religi masjid tidak terbatas ziarah kubur atau masjid bernilai sejarah, tapi telah bertransformasi menjadi destinasi wisata berbasis edukasi dan pemberdayaan ekonomi. □

**) Arif Sulfiantono MAgr MSI. Pegiat Forkom Desa Wisata DIY & Pengurus DMI DIY.*

Pojok KR

Ekonomi DIY identik kerumuman.
-- Yang penting tetap ingat Prokes.

Tol Bawen-Yogya mulai dibangun.
-- Transportasi lancar, ekonomi berkembang.

Bupati Klaten janji alokasikan anggaran difabel.
-- Mereka juga mempunyai hak seperti lainnya.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa

TANGGAL 1 Ramadan 1443 jatuh pada hari Sabtu Pon 2 April 2022, wajib puasa Ramadan bagi umat muslim di manapun, di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan segala bentuk apa saja, termasuk virus Corona-129 segera hilang dari bumi. Sehingga kita semua kembali sehat, bersih seperti sediakala. Mudah-mudahan dalam menapak bulan Ramadan ini, segala kemungkaran, narkoba dengan segala bentuknya juga musnah. Firman Allah:"Wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kamu

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetehui (QS Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 184).

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mau menjalankan puasa dalam bulan Ramadan lamanya dengan penuh rasa iman, rela dan tulus ikhlas maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lampau. (HR Bukhari Muslim). □

Bambang Syariwan Setiawan, Pleret, Wates Kulonprogo.

Wujudkan Yogya Terang Benderang

KITA mulai memasuki bulan Ramadan dan nanti segera kedatangan para pemudik saudara-dara kita dari rantau. Karena itu, alangkah baiknya di wilayah desa atau kota yang lampu penerangan jalan mati segera berbenah diri, dihidupkan. Sebab jalanan gelap akan memicu perbuatan ja-

hat seperti begal, jambret sampai klithih. Pumpung belum terjadi, saya berharap mudah-mudahan yang berwenang segera melakukan yang terbaik. Maka Yogya Istimewa yang aman dan nyaman , terang benderang terwujud. □

Nardi, KUA Pundong, Bantul

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gunt Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyati.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Perbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Pewakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.